

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI KAWASAN PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA**Herkulana¹, Jumardi Budiman^{2*}**^{1,2} Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjungpura

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:Received : February 21th 2022Revised : May 7th, 2022Accepted : June 2nd, 2022**Keywords:**

government, empowerment, SMEs, border area

Kata Kunci:

pemerintah, pemberdayaan, UMKM, perbatasan

A B S T R A C T

The purpose of this research is to know the role of local government in empowering businesses as an effort to increase the income of the people. Qualitative methods used is the method of data collection using interviews and observations. Respondents this research cooperative SMEs as head of manpower and transmigrasi Bengkayang district and the small and medium enterprises in Kecamatan Jagoi Babang. Data analysis techniques used that is the reduction of the data, presentation of data, and the withdrawal of the conclusions. The result showed that the role of government districts Bengkayang to SMEs includes data collection electronically, conduct technical training, with assistance, help product promotion, improve the budding entrepreneurs, business license issue, do the standardization. A variety of measures of empowerment is expected to increase its business owners, workers, and the general public around the location of the business..

A B S T R A K

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam memberdayakan UMKM sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat di Kecamatan Jagoi Babang yang merupakan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Nilai kebaharuan penelitian ini yakni menjadi penghubung (pengisi celah) hasil riset tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM serta efeknya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Kawasan perbatasan antar negara yang belum banyak dibahas oleh peneliti lain. Metode yang digunakan adalah metode Kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Responden penelitian ini yakni Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang dan pelaku UMKM di Kecamatan Jagoi Babang. Teknik analisa data yang digunakan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dalam upaya pemberdayaan UMKM mencakup pendataan UMKM secara elektronik, memfasilitasi kegiatan Bimbingan Teknis, melakukan pendampingan, membantu promosi produk, meningkatkan kapasitas pengusaha pemula, menerbitkan izin usaha, melakukan standarisasi produk. Berbagai langkah pemberdayaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pemilik usaha, pekerja dan masyarakat umum sekitar lokasi usaha.

PENDAHULUAN

Kabupaten Bengkayang merupakan satu di antara beberapa kabupaten di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia, tepatnya di Kecamatan Jagoi Babang. Kecamatan Jagoi Babang terletak di ujung Kabupaten Bengkayang sekaligus menjadi Kecamatan terluas yang mencakup 12,14 persen dari keseluruhan luas Kabupaten Bengkayang (Bengkayang, 2020). Jumlah penduduk di Kecamatan Jagoi Babang tahun 2018 sebanyak 10.257 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,75 persen per tahun. Adapun jumlah pengangguran terbuka sebesar 2.995 (Bengkayang, 2020). Komoditi andalan kabupaten Bengkayang pada sektor pertanian dan perkebunan seperti padi, jagung, cengkeh dan kelapa serta beberapa komoditi hasil hutan.

Seperti beberapa Kawasan perbatasan lain di Indonesia, masyarakat di Kecamatan Jagoi babang juga masih terkendala dengan berbagai masalah sosial ekonomi yang belum mampu dituntaskan oleh pemerintah pusat. Masalah tersebut lain; keterbatasan masyarakat menjangkau pelayanan publik, kemampuan mengelola sumber daya alam (SDA), keterbatasan kompetensi sumber daya manusia (SDM), minimnya infrastruktur penunjang aktivitas serta ketidakmampuan mengelola sumber daya sosial dalam mengatasi berbagai gejala sosial-ekonomi (Sutaat, 2012). Berbagai masalah tersebut menjadi sangat kompleks karena terjadi selama puluhan tahun, bahkan setelah Kabupaten Bengkayang memiliki otonomi sendiri sebagai wilayah tingkat II yang memisahkan diri dari Kabupaten Sambas pada tahun 1999.

Dinamika sosial-ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia menimbulkan fenomena pertukaran budaya termasuk penggunaan Bahasa dan mata uang ganda (Siburian, 2012; Sulehan et al., 2013). Kondisi ini juga terjadi pada masyarakat di Kecamatan Jagoi Babang. Masyarakat terbiasa melakukan transaksi ekonomi dengan masyarakat Malaysia di wilayah Serikin yang berdampak pada penggunaan mata uang ganda yakni rupiah dan ringgit serta penggunaan Bahasa campuran antara Bahasa Indonesia, Bahasa Dayak dan Bahasa Melayu Malaysia.

Terlepas dari berbagai masalah sosial- ekonomi di atas, wilayah perbatasan antar negara sebenarnya juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik. Berbagai produk kerajinan tangan yang dihasilkan masyarakat di Kecamatan Jagoi memiliki nilai jual tinggi di pasar Malaysia karena memiliki kualitas dan nilai seni yang lebih baik daripada produk serupa yang dihasilkan pengerajin di Malaysia. Produk kerajinan tangan bernilai jual tinggi yakni kerajinan Bidai dan Takin. Bidai adalah anyaman rotan berbentuk persegi atau persegi Panjang yang biasa digunakan sebagai tikar, sedangkan Takin berbentuk silinder yang digunakan sebagai perlengkapan saat Bertani. Namun demikian, kedua produk asli yang menjadi andalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Jagoi Babang ini diklaim oleh Malaysia untuk dijual di pasar Eropa (Budiman, 2018).

Masalah klaim produk yang dihasilkan pengerajin di Jagoi Babang merupakan satu di antara berbagai kendala yang dihadapi pelaku UMKM di perbatasan antar negara selain berbagai hambatan lain seperti keterbatasan pemanfaatan teknologi, kesulitan menjangkau bantuan modal, kesulitan memperoleh bahan baku, kesulitan memasarkan produk (Purnamasari et al., 2016; Yunirti, 2019). Teknologi yang digunakan dalam proses produksi masih sederhana karena lebih mengutamakan keterampilan tangan pengerajin sehingga kuantitas produk yang dihasilkan sangat terbatas. Pengadaan bahan baku khusus kerajinan rotan, juga terkendala dengan semakin minimnya ketersediaan rotan di wilayah Kabupaten Bengkayang, sehingga harus didatangkan dari provinsi lain (Budiman, 2018). Adapun masalah pemasaran, pelaku UMKM hanya menunggu pesanan dari pembeli dari Malaysia untuk menghindari risiko jika produk yang sudah diproduksi tidak terjual.

Langkah penyelesaian masalah sosial - ekonomi serta berbagai kendala UMKM di area perbatasan antar negara dilakukan dengan membangun sarana penunjang dan pembangunan SDM (Johannes, 2019). Solusi ini menuntut peran aktif dari pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas UMKM dapat berupa pemberian subsidi bahan baku, menjadi fasilitator guna mempermudah akses pengajuan kredit mikro dan sebagai katalisator dengan memberi pendampingan pengelolaan usaha pada pelaku UMKM serta menjaga iklim

persaingan usaha tetap kondusif (Ehrenberger et al., 2015; Eniola & Entebang, 2015; Ibrahim & Mustaph, 2019; Mahmood & Mohd Rosli, 2013; Ntiamoah et al., 2016; Oni, 2012; A. Putra, 2016; Sedyastuti, 2018; Suci, 2017; Tyas & Safitri, 2014).

Peran serta pemerintah daerah dalam pemberdayaan usaha kecil sangat perlu dilakukan karena UMKM memegang peranan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan perkenomomian suatu negara (Gunartin, 2017; Muhammad et al., 2010; Sarfiah et al., 2019; Susilo, 2010; Taiwo et al., 2013). Hasil riset menunjukkan bahwa sumbangan Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor usaha mikro lebih tinggi dari usaha skala besar, meskipun sumbangan tersebut lebih disebabkan karena jumlah usaha mikro lebih banyak, walaupun produktivitasnya rendah (Ahmedova, 2015; Jahanshahi et al., 2011; Tambunan, 2011). UMKM juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan (Ahmadun, 2019; Budiawan, 2013; Bustam, 2016; Hafni & Rozali, 2017; Prasetyo, 2016; A. Putra, 2016; Setiawan, 2015; Sholikha, 2018; Suci et al., 2017).

Beberapa tinjauan empiris tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM yang mendasari kajian ini dilakukan yakni: hasil penelitian Jahanshahi, dkk (2011) menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah yang mencakup regulasi, kebijakan perdagangan, kebijakan tenaga kerja, kebijakan perdagangan regional, kebijakan sosial dan kesetaraan gender memberikan dampak terhadap pertumbuhan usaha mikro (Jahanshahi et al., 2011). Penelitian Putra (2015) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan katalisator dalam mengembangkan UMKM, artinya pemerintah daerah wajib memfasilitasi pelaku UMKM dalam upaya menjangkau sumber daya yang diperlukan serta mendampingi pelaku UMKM agar mampu mencapai tujuan usaha secara cepat dan efisien (T. G. Putra, 2015). Hasil kajian Ntiamoah, dkk (2016) menyatakan bahwa dukungan pemerintah dan institusi lain yang relevan memberikan efek positif dan signifikan terhadap peningkatan kapasitas usaha mikro (Ntiamoah et al., 2016). Sejalan dengan hasil riset tersebut, Ibrahim dan Mustaph (2019) juga mendeskripsikan hasil kajian mereka bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam membantu pelaku UMKM menentukan orientasi usaha serta konsep pemasaran yang efektif melalui berbagai kebijakan yang menjamin kondufititas pengelolaan usaha kecil (Ibrahim & Mustaph, 2019). Adapun kajian empiris tentang peran UMKM dalam peningkatan pendapatan masyarakat, yakni sebagai berikut; hasil penelitian Sholika (2018) yang menyimpulkan bahwa keberadaan UKM Batik Sari berperan dalam peningkatan penghasilan masyarakat, khususnya kaum wanita yang menjadi pekerja di UKM tersebut (Sholikha, 2018).

Berdasarkan kajian terhadap kondisi awal yang terjadi pada pelaku UMKM di Kecamatan Jagoi Babang, serta kajian empiris terhadap beberapa hasil riset yang relevan, maka nilai kebaruaran (novelty) pada penelitian ini yakni menjadi penghubung (pengisi celah) hasil riset tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM serta efeknya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Kawasan perbatasan antar negara yang belum banyak dibahas oleh peneliti lain. Dasar argument ini yang menjadikan topik penelitian ini dirasa perlu dan penting untuk dilakukan.

KAJIAN PUSTAKA

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik

langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usah kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro (Tambunan, 2011).

Kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Adapun kriteria UMKM sebagai berikut: a) Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta; b) Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000, dan c) Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Kondisi ini dibuktikan dengan masih mampunya UMKM dalam mempertahankan kegiatan usahanya di saat krisis ekonomi (Tambunan, 2011).

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas (Pratomo & Soedjono, 2004).

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah: a) Penyediaan lapangan kerja; b) Sumber wirausaha baru; c) Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar; d) Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya; e) Memiliki potensi untuk berkembang (Anoraga, 2010).

Adapun kelemahan, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro terdiri dari 2 faktor yakni faktor Internal yang meliputi: a) Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia; b) Kendala pemasaran produk; c) Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk Industri; d) Kendala permodalan usaha dan faktor eksternal yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih (Anoraga, 2010).

Konsep Pendapatan

Pendapatan menunjukkan seluruh uang atau hasil material lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi (Winardi, 2012).

Pendapatan dapat juga diuraikan sebagai keseluruhan penerimaan yang diterima pekerja, buruh atau rumah tangga, baik berupa fisik maupun non fisik selama ia melakukan pekerjaan pada suatu perusahaan instansi atau pendapatan selama ia bekerja atau berusaha. Setiap orang yang bekerja akan berusaha untuk memperoleh pendapatan dengan jumlah yang maksimum agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pendapatan masyarakat dapat berasal dari bermacam-macam sumbernya, yaitu: a) Sektor formal (gaji atau upah yang diterima secara bertahap); b) Sektor informal (sebagai penghasilan tambahan dagang, tukang, buruh, dan lain-lain); c) Sektor subsisten (hasil usaha sendiri berupa tanaman, ternak, dan pemberian orang lain).

METODA PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena peneliti ingin mengungkapkan secara komprehensif tentang peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang khususnya Dinas Koperasi dan UMKM dalam memberdayakan

UMKM sebagai upaya meningkatkan pendapatan pelaku UMKM di Kecamatan Jagoi Babang. Sugiyono memberikan gambaran tentang penelitian kualitatif yakni; “Metode penelitian kualitatif dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2011).

Pendekatan kualitatif dipilih karena alasan berikut: (1) realitas yang ada pada dasarnya bersifat ganda, terkonstruksi dan holistik; (2) antara orang yang mengetahui dan diketahui bersifat interaktif dan tidak dapat dipisahkan; (3) hanya waktu dan konteks yang memungkinkan berkaitan dengan hipotesis kerja; (4) semua entitas yang ada dalam kondisi yang saling simultan sehingga tidak mungkin membedakan sebab-akibat; (5) penelitian pada dasarnya bebas dari nilai (Basri, 2011).

Subjek Penelitian

Subjek penelitian sekaligus sebagai sumber data primer yakni; a) Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang, yang diwakili oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM; b) Pelaku UMKM di Kabupaten Bengkayang.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui proses komunikasi langsung berdasarkan pedoman wawancara dengan bantuan alat perekam (*recorder*) guna memudahkan peneliti mendokumentasikan hasil wawancara. Teknik pengumpulan data selanjutnya yakni observasi secara langsung terhadap pemberdayaan UMKM di Kecamatan Jagoi Babang. Adapun dokumen / arsip yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM digunakan sebagai sumber sekunder.

Teknik Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisa dengan pendekatan kualitatif model Miles & Hubberman yang terdiri atas *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verivication* (Sugiyono, 2011). Setelah data terkumpul, kemudian dianalisa dengan menggunakan Teknik analisa kualitatif model Miles dan Hubberman yang terdiri atas penyajian data, reduksi (pengelompokan) data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2011).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Plt Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Diskopnakertrans) Kabupaten Bengkayang, dapat dinyatakan bahwa peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dalam pengembangan kapasitas pelaku UMKM meliputi peran pemerintah sebagai fasilitator, sebagai regulator dan sebagai katalisator. Bentuk penerapan dari peran ini dapat ditinjau dari UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil Mikro dan Menengah bahwa pengembangan UMKM dapat dilaksanakan pada bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi.

Beberapa langkah pengembangan UMKM yang dilakukan Diskopnakertrans Kabupaten Bengkayang yakni:

1. Pendataan Elektronik

a. Bidang Produksi dan Pengolahan

Proses pendataan secara elektronik dilaksanakan Diskopnakertrans kepada pelaku UMKM di seluruh wilayah kabupaten bengayang. Hasil pendataan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Data UMKM Kabupaten Bengkayang

No	Kecamatan	Mikro	Kecil	Menengah
1	Sungai raya	385	65	0
2	Sungai raya kepulauan	230	19	0
3	Capkala	80	75	0
4	Monterado	529	19	0

5	Samalantan	403	7	0
6	Lembah bawang	145	7	1
7	Sungai betung	119	22	0
8	Bengkayang	474	221	14
9	Teriak	177	2	0
10	Lumar	131	1	0
11	Ledo	117	2	0
12	Suti semarang	131	1	0
13	Sanggau ledo	165	54	0
14	Tujuh belas	154	18	0
15	Seluas	134	22	0
16	Jagoi babang	114	6	0
17	Siding	106	3	0

Sumber: Data Diskopnakertrans Kab. Bengkayang, 2020

Berdasarkan pendataan elektronik tersebut diketahui bahwa jumlah usaha mikro di Kecamatan Jagoi Babang sebanyak 114 dan usaha kecil sebanyak 6, sedangkan belum ada yang termasuk kategori menengah. Bidang produksi utama di Kecamatan Jagoi Babang adalah kerajinan tangan hasil olahan rotan.

b. Pemasaran

Berdasarkan hasil pendataan elektronik di Kecamatan Jagoi Babang, diperoleh data omset pemasaran kerajinan Bidai sebagai berikut:

Tabel 2 Data Omset Pelaku UMKM di Jagoi Babang

No	Nama Usaha	Omset per Tahun
1	UKM SENTRA BIDAI	3.845.400.000
2	BONG TO PUI	2.457.000.000
3	BANTANG JAYA	2.839.200.000
4	BIDAI PAUM	3.042.000.000
5	KINDAU HRB	3.845.400.000

Sumber: Data Diskopnakertrans Kab. Bengkayang, 2020

Pada aspek pemasaran, jenis usaha yang berhasil di data oleh Diskopnakertrans Kabupaten Bengkayang adalah pelaku usaha yang telah memiliki catatan keuangan yang terstruktur sehingga dapat dengan mudah menghitung jumlah omset dalam setahun. Jika menilik pada penggolongan usaha berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008, sebenarnya beberapa usaha di Kecamatan Jagoi Babang sudah masuk dalam kategori Usaha Menengah karena omset per tahun sudah di atas 2,5 Milyar Rupiah. Namun demikian, pihak Diskopnakertrans Kabupaten Bengkayang belum memasukkan pelaku usaha tersebut dalam kategori Usaha Menengah karena nilai omset tersebut sangat fluktuatif, tergantung nilai tukar rupiah dengan ringgit Malaysia.

c. Sumber Daya Manusia

Hasil pendataan elektronik untuk aspek sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh Diskopnakertrans Kabupaten Bengkayang untuk wilayah Kecamatan Jagoi Babang belum sepenuhnya tersedia. Hal ini disebabkan sebagian besar usaha tersebut masuk kategori Usaha Mikro sehingga pengelolaannya masih dilaksanakan sendiri oleh pemilik usaha dibantu keluarga inti. Adapun beberapa usaha yang telah masuk kategori Usaha Menengah dengan jumlah pekerja lebih dari 10 orang yakni sebagai berikut:

Tabel 3 Data SDM Usaha Kerajinan di Kec. Jagoi Babang

No	Nama Usaha	Jumlah SDM
1	UKM SENTRA BIDAI	29
2	BONG TO PUI	21
3	BANTANG JAYA	26
4	BIDAI PAUM	26
5	KINDAU HRB	29

Sumber: Data Diskopnakertrans Kab. Bengkayang, 2020

d. Desain dan Teknologi

Pendataan elektronik untuk aspek desain dan teknologi yakni berupa upaya mengumpulkan corak khas kerajinan Bidai dari Kecamatan Jagoi Babang. Tujuan akhir dari pendataan ini adalah pengupayaan Hak Cipta atas desain corak tersebut sehingga tidak diakui oleh pedagang di Malaysia. Hasil wawancara dengan Plt Diskopnakertrans Kabupaten Bengkayang bahwa sampai saat ini baru satu orang pelaku usaha kerajinan Bidai yang mendaftarkan desain coraknya untuk diajukan Hak Cipta.

2. Bimbingan Teknis (Bimtek)

a. Bidang produksi dan pengolahan

Bimtek dalam bidang produksi dan pengolahan telah menjadi agenda rutin dari Diskopnakertrans Kabupaten Bengkayang. Tujuan bimtek pada aspek ini yakni memberikan keterampilan baru bagi para pengusaha kerajinan rotan di Kecamatan Jagoi Babang seperti pengolahan bahan sisa pembuatan Bidai, alternatif material maupun peningkatan kapasitas produksi.

b. Pemasaran

Bimtek pemasaran lebih ditekankan pada peningkatan nilai jual serta mendorong pelaku usaha mencari pasar alternatif selain wilayah Serikin, Malaysia. Satu di antara wujud bimtek bidang pemasaran yakni pemasaran dengan memanfaatkan media internet.

c. Sumber daya manusia

Bimtek pengelolaan SDM dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun dengan tujuan memberikan keterampilan manajerial kepada pelaku usaha yang telah memiliki pekerja tetap. Aspek pengelolaan SDM sangat penting dilakukan agar pengusaha dapat memperlakukan para pekerja secara profesional karena umumnya pekerja tersebut adalah keluarga, tetangga dan orang-orang di sekitar lokasi usaha.

d. Desain dan teknologi

Bimtek desain dan teknologi lebih menekankan pada pemanfaatan teknologi dalam proses produksi, perancangan desain/ corak kerajinan Bidai dan promosi usaha. Bimtek pemanfaatan teknologi sederhana dalam proses produksi bertujuan meningkatkan kualitas produk kerajinan Bidai agar nilai jualnya dapat lebih tinggi. Bimtek penggunaan teknologi dalam perancangan desain/corak dengan memanfaatkan aplikasi desain sederhana di komputer. Adapun bimtek pemanfaatan teknologi untuk kegiatan promosi dan pemasaran usaha melalui akun media sosial masing-masing pelaku usaha maupun website pemerintah daerah.

3. Pendampingan oleh Pendamping UMKM

Diskopnakertrans Kabupaten Bengkayang memiliki 2 orang pendamping UMKM yang bertugas membantu para pelaku UMKM untuk mengatasi berbagai persoalan teknis yang mereka hadapi. Jumlah pendamping ini sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Bengkayang yang mencapai 4200 usaha. Strategi yang dilaksanakan pendamping UMKM agar pendampingan berlangsung optimal yakni selalu berkoordinasi dengan seksi pengembangan usaha kecil yang ada di setiap kecamatan serta selalu ikut serta dalam setiap kegiatan pengembangan kapasitas UMKM. Khusus pelaku UMKM di Kecamatan Jagoi Babang, proses pendampingan meliputi aspek bidang produksi dan pengolahan kerajinan rotan, aspek pemasaran kerajinan rotan baik di pasar domestik maupun luar negeri, aspek peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta aspek pemanfaatan teknologi bagi kemajuan usaha.

4. Bantuan promosi usaha

Peran Diskopnakertrans Kabupaten Bengkayang dalam membantu mempromosikan dan memasarkan produk kerajinan rotan milik pelaku UMKM di Kecamatan Jagoi Babang yakni dengan mengizinkan para pelaku usaha memanfaatkan akun media sosial milik Diskopnakertrans untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat. Selain itu, pelaku UMKM dari Kecamatan Jagoi Babang selalu dilibatkan dalam kegiatan pameran produk unggulan daerah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional karena kerajinan rotan berupa Bidai merupakan produk khas dari Kabupaten Bengkayang.

5. Peningkatan kapasitas dan fasilitas Wirausaha Pemula (WP)

Program peningkatan kapasitas WP yang dilaksanakan oleh Diskopnakertrans Kabupaten Bengkayang tahun 2019 khusus di Kecamatan Jagoi Babang ditujukan kepada 28 WP. Upaya

peningkatan kapasitas pengusaha pemula ini mencakup bidang produksi dan pengolahan, pemasaran produk, pengelolaan SDM dan pemanfaatan teknologi Program ini bekerjasama dengan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Kementerian Koperasi dan Bank Indonesia Wilayah Kalbar. Selain peningkatan kapasitas, sebanyak 13 WP juga mendapat bantuan permodalan dengan total 143 juta rupiah.

6. Sertifikat izin usaha

Izin usaha merupakan aspek substantif bagi pelaku UMKM. Memperoleh izin usaha artinya mendapat pengakuan dan legalitas atas usaha yang dijalani yang dengan sendirinya akan mendapat perlindungan hukum dan undang-undang yang berlaku. Namun demikian, tidak semua pelaku UMKM mau mengurus izin usah dengan alasan birokrasi yang berbelit, sulit memenuhi syarat administrasi serta omset yang masih relatif kecil sehingga izin usaha dirasa belum dibutuhkan. Guna mengantisipasi kondisi tersebut, Diskopnakertrans Kabupaten Bengkayang memberikan bantuan pengurusan izin usaha kepada pelaku UMKM di Kecamatan Jagoi Babang.

7. Standarisasi produk

Upaya melakukan standarisasi produk UMKM di wilayah Jagoi Babang oleh Diskopnakertrans Kabupetan Bengkayang, yakni dengan memberikan bantuan kepada pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produk mereka sebagai Hak Cipta Merk Dagang. Pada tahun ini, terdapat satu pengusaha yang telah memanfaatkan fasilitas tersebut. Saat ini ajuan hak cipta merk sedang diproses oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Peningkatan pendapatan masyarakat Kecamatan Jagoi Babang sebagai dampak dari peningkatan kapasitas pelaku UMKM dapat dibahas menjadi tiga aspek; peningkatan pendapatan pemilik UMKM, peningkatan pendapatan pekerja di UMKM dan peningkatan pendapatan masyarakat lain sebagai dampak dari adanya UMKM.

1. Peningkatan pendapatan pemilik UMKM

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Diskopnakertrans Kabupetan Bengkayang, bahwa beberapa pemilik UMKM kerajinan rotan di Kecamatan Jagoi Babang telah memiliki omset di atas 2,5 Milyar Rupiah per tahun. Peningkatan jumlah omset ini sebagai manfaat dari semakin baiknya tata kelola yang dilakukan pemilik usaha baik dari segi kualitas dan kuantitas produk, pengelolaan SDM, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai media promosi dan penjualan.

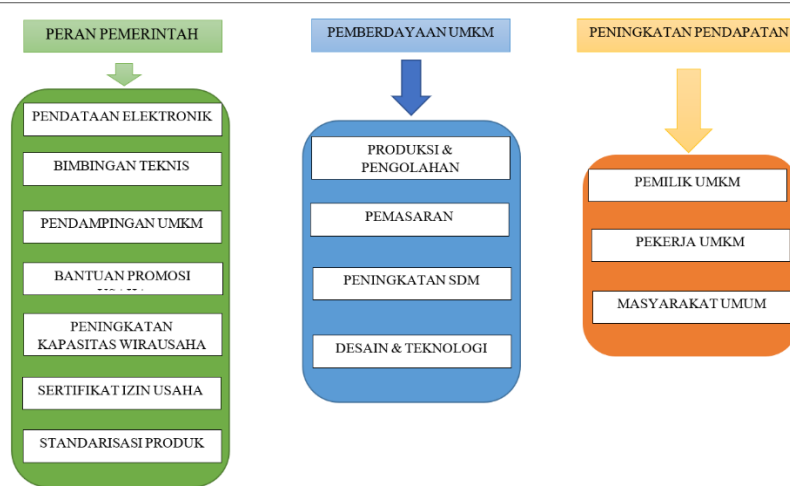
2. Peningkatan pendapatan pekerja di UMKM

Peningkatan permintaan produk kerajinan Bidai oleh pasar luar negeri, menjadi peluang bagi pemilik usaha untuk meningkatkan kuantitas produk yang dihasilkan. Hal ini mendorong terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat untuk bergabung sebagai pengerajin pada sentra usaha Bidai di Kecamatan Jagoi Babang, khususnya kaum perempuan yang memang telah memiliki keterampilan menganyam rotan sejak kecil. Bekerja sebagai pengerajin akan memberikan penghasilan tambahan untuk membantu perekonomian keluarganya.

3. Peningkatan pendapatan masyarakat lain sebagai dampak dari adanya UMKM Kerajinan Rotan

Kualitas produk kerajinan Bidai hasil olahan pelaku UMKM di Kecamatan Jagoi Babang telah mendapat pengakuan dari pasar internasional. Kerapian anyaman serta bahan baku berkualitas menjadi kunci penting dari usaha ini. Semakin tinggi permintaan produk Bidai maka kebutuhan terhadap bahan baku berupa rotan dan kulit kayu *kapua'* juga semakin tinggi. Kebutuhan ini akan menjadi peluang bagi masyarakat lain sebagai penyedia bahan baku. Walaupun saat ini rotan yang digunakan sebagai besar dibeli dari wilayah Kalimantan Tengah, namun untuk bahan kulit *kapua'* masih dapat dibuat dan diperoleh di sekitar Jagoi Babang.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka peran pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pemberdayaan UMKM sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat di Kecamatan Jagoi Babang dapat digambarkan dalam pola hubungan berikut:



Gambar 1. Pola Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM

Sumber: Hasil Olah Data, 2020

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang melalui Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pemberdayaan dan peningkatan kapasitas UMKM mencakup pendataan UMKM secara elektronik, memfasilitasi kegiatan Bimbingan Teknis, melakukan pendampingan, membantu promosi produk, meningkatkan kapasitas pengusaha pemula, menerbitkan izin usaha, melakukan standarisasi produk. Berbagai langkah pemberdayaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pemilik usaha, pekerja dan masyarakat umum sekitar lokasi usaha. Implikasi hasil dari riset ini sebagai penyebarluasan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan kajian tentang peran pemerintah terhadap pengembangan kapasitas pelaku UMKM di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Keterbatasan dalam penelitian ini yakni hasil riset ini masih bersifat dasar sehingga terbuka kesempatan untuk diadakan penelitian lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadun. (2019). Pemberdayaan UMKM Bagi Usaha Keluarga dalam Meningkatkan Pendapatan Di Kampung Jangkar Desa Mekarwangi Cariu Bogor. *Jurnal Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35–42.
- Ahmedova, S. (2015). Factors for Increasing the Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) in Bulgaria. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 195, 1104–1112. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.155>
- Basri, M. (2011). *Internalization of Attitudes and Intention in the Morality of Students of Economics Faculty of Economics Education Program State University of Malang*. Malang University.
- Bengkayang, B. K. B. P. S. K. (2020). *Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2020, Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan*. BPS Kabupaten Bengkayang.
- Budiawan, A. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Industri Kecil Pengolahan Ikan di Kabupaten Demak. *Economics Development Analysis Journal*, 2(1), 175–192.
- Budiman, J. (2018). Bidai dan Takin Dalam Perspektif Sosio-Ekonomi Masyarakat Perbatasan Indonesia-Malaysia. *JSHP (Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan)*, 2(1), 85. <https://doi.org/10.32487/jshp.v2i1.281>
- Bustam, N. H. (2016). Pengaruh Jumlah Unit, PDB dan Investasi UMKM Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Periode 2009-2013. *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(2), 250–261.
- Ehrenberger, M., Koudelkova, P., & Strielkowski, W. (2015). Factors Influencing Innovation in Small and Medium Enterprises in the Czech Republic. *Periodica Polytechnica Social and Management Sciences*, 23(2), 73–83. <https://doi.org/10.3311/PPso.7737>

- Eniola, A. A., & Entebang, H. (2015). Government Policy and Performance of Small and Medium Business Management. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 5(2), 237–248. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v5-i2/1481>
- Gunartin. (2017). Penguatan UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal Pendidikan, Hukum, Dan Bisnis*, 2(2), 1–10. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Hafni, R., & Rozali, A. (2017). Analisis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. *Ilmu Ekonomi Dan Studin Pembangunan*, 15(2), 77–96.
- Ibrahim, M. I., & Mustaph, B. (2019). Determinants of Small and Medium Enterprises Performance in Nigeria: The Role of Government Support Policy. *International Journal of Business and Economics Research*, 8(2), 41–49. <https://doi.org/10.11648/j.ijber.20190802.11>
- Jahanshahi, A. A., Nawaser, K., Sadeq Khaksar, S. M., & Kamalian, A. R. (2011). The Relationship Between Government Policy and the Growth of Entrepreneurship in the Micro, Small & Medium Enterprises of India. *Journal of Technology Management & Innovation*, 6(1), 66–76. <https://doi.org/10.4067/S0718-27242011000100007>
- Johannes, A. W. (2019). Penanganan Masalah-Masalah Sosial Di Kecamatan Kawasan Perbatasan Kabupaten Sanggau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 4(2), 50–61. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v4i2.763>
- Mahmood, R., & Mohd Rosli, M. (2013). Microcredit position in micro and small enterprise performance: the Malaysian case. *Management Research Review*, 36(5), 436–453. <https://doi.org/10.1108/01409171311327226>
- Muhammad, M. Z., Char, A. K., Yasoa', M. R. bin, & Hassan, Z. (2010). Small and Medium Enterprises (SMEs) Competing in the Global Business Environment: A Case of Malaysia. *International Business Research*, 3(1), 66–75. <https://doi.org/10.5539/ibr.v3n1p66>
- Ntiamoah, E. B., Li, D., & Kwamega, M. (2016). Impact of Government and Other Institutions' Support on Performance of Small and Medium Enterprises in the Agribusiness Sector in Ghana. *American Journal of Industrial and Business Management*, 06(05), 558–567. <https://doi.org/10.4236/ajibm.2016.65052>
- Oni, E. O. (2012). Development of Small and Medium Scale Enterprises: The role of Government and other Financial Institutions. *Oman Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review*, 1(7), 16–29.
- Prasetyo, D. Y. (2016). Peranan Website E-Commerce Guna Meningkatkan Perekonomian Di Wilayah Perbatasan (Studi Kasus Pada Umkm Di Kabupaten Indragiri Hilir). *Jurnal BAPPEDA*, 2(2), 1–8.
- Purnamasari, W., Kara, M. H., AR, Moh. S., & K, A. (2016). Perkembangan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara Indonesia Malaysia Di Sambas. *Jurnal Diskursus Islam*, 4(2), 217–247. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdi.v4i2.7364>
- Putra, A. (2016). Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(2), 227635.
- Putra, T. G. (2015). Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(April), 1–10.
- Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 41–52.
- Sedyastuti, K. (2018). Analisis Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Daya Saing dalam Kancan Pasar Global. *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 2(1), 117–127. <https://doi.org/10.31842/jurnal-inobis.v2i1.65>
- Setiawan, A. H. (2015). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Provinsi Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, 3(1), 39–47. <https://doi.org/10.15294/edaj.v4i4.8539>
- Sholikha, S. M. (2018). Peran UKM Batik Sari dalam Meningkatkan Penghasilan Masyarakat di Kecamatan Tulangan Sidoarjo. *Jurnal Widyaloka IKIP Widya Darma*, 5(1), 82–93.

- Siburian, R. (2012). Pulau Sebatik: Kawasan Perbatasan Indonesia Beraroma Malaysia. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 14(1), 53–76.
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi*, 6(1), 51–58.
- Suci, Y. R., Kurniawan, F. D., Fauziah, L., Adhi, M., Dan, D., Samarinda, K., Adawiyah, W. R., Oleh, I. E., Umkm, P., Kota, D. I., Yuwono, R., Retno, R. R., Bisnis, P. M., Manajemen, P. S., Petra, U. K., Siwalankerto, J., Kota, U., Lee, J., Jetis, K. B., ... Unit, B. (2017). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 6(1), 103–220. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.12.110>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (14th ed.). Alfabeta.
- Sulehan, J., Bakar, N. R. A., Awang, A. H., Abdullah, M. Y., & Liu, O. P. (2013). Development at the Margins: Livelihood and Sustainability of Communities at Malaysia - Indonesia Borders. *Sociologija i Prostor*, 51(3), 548–562.
- Susilo, Y. S. (2010). Strategi Meningkatkan Daya Saing UMKM Dalam Menghadapi Implementasi CAFTA dan MEA. *Buletin Ekonomi Agustus*, 8(2), 70–170.
- Sutaat, S. (2012). Pemberdayaan Masyarakat Daerah Perbatasan Antar Negara; Studi Masalah, Kebutuhan dan Sumber Daya Sosial Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang - Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. *Jurnal Sosio Konsepsia*, 17(1), 52–71.
- Taiwo, M. A., Ayodeji, A. M., & Yusuf, B. A. (2013). Impact of Small and Medium Enterprises on Economic Growth and Development. *American Journal of Business and Management*, 2(1), 18. <https://doi.org/10.11634/21679606170644>
- Tambunan, T. T. H. (2011). Development of micro, small and medium enterprises and their constraints: A story from Indonesia. *Gajah Mada International Journal of Business*, 13(1), 21–43. <https://doi.org/10.22146/gamaijb.5492>
- Tyas, A., & Safitri, V. (2014). Penguatan Sektor UMKM sebagai Strategi Menghadapi Mea 2015. *Jurnal Ekonomi Universitas Esa Unggul*, 5(1), 42–48.
- Yunirti, Y. (2019). Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kawasan Indonesia –Malaysia-Thailand (IMT-GT). *Business Preneur: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 1(2), 103–110.